

KOMPETENSI NELAYAN RAWAI TUNA DITINJAU DARI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU

Competency of Tuna Longline Fishers Viewed From The Indonesian National Occupational Competency Standards in Palabuhanratu Nusantara Fishing Port

Yasinta Anugerah, Tri Wiji Nurani dan Muhammad Fedi A. Sondita

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor
Jl. Raya Darmaga Kampus IPB, Babakan, Dramaga, Bogor, Jawa Barat 16680, Indonesia

Diterima tanggal: 18 Juni 2015 Diterima setelah perbaikan: 2 Januari 2016

Disetujui terbit: 8 Desember 2016

*email: anugerah.yasinta@live.com

ABSTRAK

Nelayan harus memiliki kompetensi saat melakukan pekerjaan kasar di lingkungan kapal dan pendaratan tuna harus memiliki kualitas tertentu. Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) untuk nelayan rawai tuna dapat menjadi suatu pendekatan untuk mengetahui kompetensi nelayan tanpa adanya latar belakang pendidikan formal yang tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan tingkat kompetensi nelayan rawai tuna di PPN Palabuhanratu dengan mengacu pada standar tertentu. Pengambilan data dilakukan pada bulan Desember 2014 - Februari 2015. Data kompetensi dari 25 nelayan dengan 5-10 tahun pengalaman kerja dikumpulkan melalui pengamatan langsung, wawancara dengan nelayan dan pengawas di pelabuhan. Data yang dimaksud adalah ukuran terpenuhinya kriteria kinerja yang ditetapkan dalam standar. Nakhoda menunjukkan kesesuaian tertinggi pada standar unit kompetensi Penangkapan ikan di laut dengan menggunakan rawai tuna, sedangkan ABK menunjukkan kesesuaian tertinggi pada standar unit kompetensi Melakukan perawatan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di laut. Kapten dan ABK menunjukkan tercapainya kompetensi lebih dari 50% dari standar.

Kata Kunci: nelayan, kompetensi, rawai tuna, SKKNI

ABSTRACT

Fishers must have a set of competence while doing menial jobs in the tuna boats and landings must have certain qualities. The Indonesian National Occupational Competency Standards (SKKNI) for tuna longline can be used to determine the status of competency of a fisher, without a high formal education background. This study was conducted to determine level competency of tuna longline fishers in PPN Palabuhanratu with reference to the given standards. Data collection was conducted in December 2014 - February 2015. Data on competency of 25 fishers with 5-10 year working experience were collected through direct observation, interviews with fishers and their supervisors at the fishing port. Data were measured in terms of the fulfillment performance criteria specified in the standard. The captains exhibited the highest compliance on standard competency unit of tuna longline capture while the crews exhibited the highest compliance on standard competency unit of hook and line fishing gear maintenance and protection at sea. The captains and crews indicated of more than 50% compliance achievement of the recommended standards.

Keywords: fishers, competency, tuna longline, SKKNI

PENDAHULUAN

Total volume produksi perikanan tangkap pada tahun 2014 mencapai 6,2 juta ton, salah satu komoditi utama yaitu ikan tuna sebanyak 310.560 ton (Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),

2014). Perikanan tuna di Indonesia merupakan salah satu industri perikanan yang semakin berkembang. Indonesia memiliki keunggulan geografis yaitu berada di antara dua Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Hal tersebut membuat Indonesia menjadi negara penting bagi perikanan tuna

global. Selain itu, Indonesia telah menjadi anggota Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional atau *Regional Fisheries Management Organisations* (RFMOs), sehingga perikanan tuna di Indonesia semakin diperhatikan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu berhadapan langsung dengan perairan samudera, yang merupakan *fishing ground* tuna hingga perairan Samudera Hindia. Sebagai komoditi ekspor, tuna ditangkap dengan menggunakan unit rawai tuna dimana termasuk alat tangkap ramah lingkungan. Hal tersebut dikarenakan rawai tuna bersifat pasif dan selektif dalam beroperasi, tetapi operasi penangkapan ikan dengan rawai tuna memiliki bahaya untuk keselamatan para pekerjanya. Faktor manusia atau *human factor* adalah faktor yang berhubungan dengan perilaku dan aktivitas manusia. Faktor manusia pada operasi penangkapan ikan dengan rawai tuna yaitu nahkoda, perwira dan ABK, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan keselamatan dalam operasi penangkapan.

Nelayan rawai tuna dalam bekerja di atas kapal sangat jauh dari kondisi aman. Kemampuan mengoperasikan alat tangkap dan menangani hasil tangkapan tuna menjadi keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh nelayan. Selain itu pekerjaan sebagai nelayan kurang dihargai dengan pemberian upah yang rendah. Hal tersebut disebabkan pendidikan dan pelatihan bagi nelayan masih kurang sehingga kompetensi kerja yang dimiliki juga belum memenuhi standar seharusnya. Kurangnya kompetensi yang dimiliki dapat mengakibatkan nelayan mengalami kecelakaan dalam bekerja di atas kapal. Akibat lainnya adalah mutu ikan tuna berkurang sehingga harga jual menurun dan tidak memenuhi kriteria ekspor. Hal tersebut sangat mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh nelayan. Nelayan yang dibutuhkan dalam kegiatan operasi penangkapan tuna harus memiliki kualitas kerja yang baik.

Pada bidang penangkapan ikan, kompetensi nelayan dapat melalui pendekatan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja. Jenjang KKNI tersebut menjadi dasar yang tepat untuk menyetarakan kompetensi nelayan yang

memiliki tingkat pendidikan yang rendah namun memiliki pengalaman yang tinggi.

Standar kompetensi tersebut diharapkan dapat menjadi tolok ukur pendapatan nelayan, dimana nelayan lebih memiliki kompetensi yang baik akan mendapatkan pendapatan yang lebih. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah membuat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dari berbagai bidang termasuk penangkapan ikan di laut. SKKNI diperlukan sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaan di atas kapal dengan mempertimbangkan keselamatan dan kualitas kerja yang baik. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat menjadi gambaran awal kompetensi yang dimiliki nelayan saat ini sehingga dapat menjadi pertimbangan pengelolaan tenaga kerja perikanan tangkap yang kompeten. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kompetensi nelayan rawai tuna di PPN Palabuhanratu sesuai dengan SKKNI dan mengetahui prioritas kompetensi yang perlu ditingkatkan.

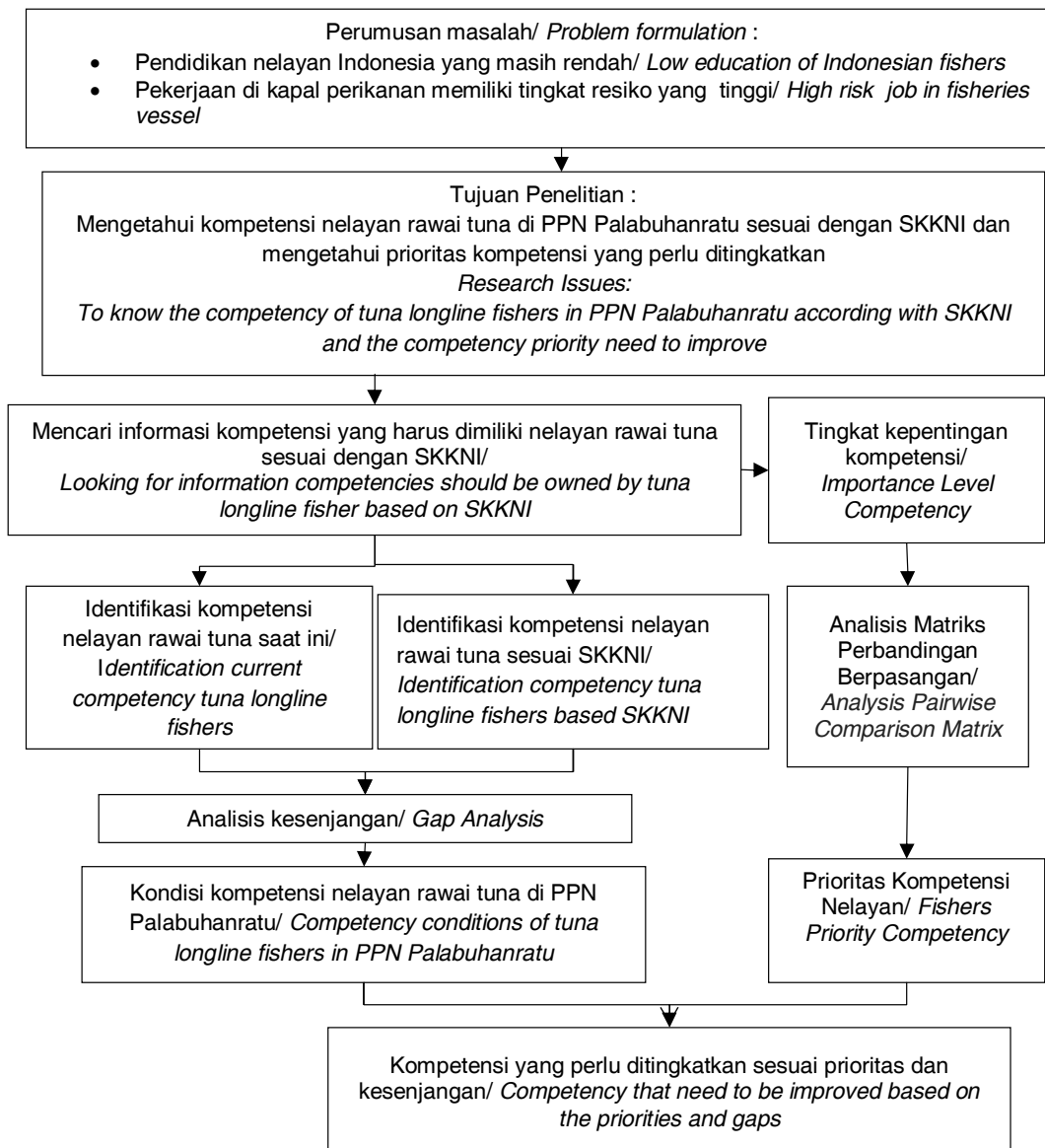
METODOLOGI

Waktu dan Lokasi Penelitian

Pengambilan data lapangan dilakukan pada bulan Desember 2014 -Februari 2015. Tempat penelitian dilakukan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian tersebut atas pertimbangan PPN Palabuhanratu merupakan *fishing base* kapal rawai tuna yang aktif beroperasi.

Kerangka Penelitian

Resiko dan bahaya saat pengoperasian rawai tuna maupun terjaganya mutu hasil tangkapan sangat dipengaruhi oleh kemampuan nelayan. Peningkatan kompetensi nelayan rawai tuna di PPN Palabuhanratu dibutuhkan informasi kompetensi yang dimiliki nelayan saat ini. Informasi tersebut dapat diidentifikasi cara dan strategi peningkatan kompetensi yang diperlukan. Saat ini telah tersedia standar kompetensi yang harus dimiliki nelayan dalam kegiatan operasi penangkapan ikan. Standar tersebut dapat menjadi acuan kompetensi yang harus dimiliki oleh nelayan rawai tuna. Penelitian ini akan mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh nelayan rawai tuna di PPN Palabuhanratu dan membandingkannya dengan SKKNI yang telah tersedia. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Penelitian
Figure 1. Research Framework

Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Instrumen pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Instrumen ini digunakan untuk mengetahui tugas nelayan rawai tuna sesuai dengan jenjang kualifikasi. Instrumen kedua adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) masuk kedalam Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan

Pokok Perikanan Golongan Penangkapan Ikan Sub Golongan Penangkapan Ikan di Laut. SKKNI terdiri dari unit dan elemen kompetensi, dimana unit kompetensi adalah komponen dalam kelompok kompetensi yang terdiri dari beberapa elemen. Elemen kompetensi adalah bagian dari unit kompetensi yang digambarkan secara rinci.

Instrumen ketiga yang digunakan adalah pertanyaan untuk wawancara mendalam kepada responden. Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nelayan kapal rawai tuna. Jabatan tugas pada kapal rawai tuna di PPN Palabuhanratu yaitu Nakhoda, Wakil nakhoda, Kepala Kamar Mesin (KKM), boatswain, koki dan

anak buah, sehingga unit kompetensi berdasarkan SKKNI disesuaikan dengan jabatan tersebut. Unit kompetensi nakhoda kapal penangkap ikan dengan rawai tuna ditunjukkan pada Tabel 1 dan unit kompetensi Anak Buah Kapal (ABK) pada kapal rawai tuna ditunjukkan pada Tabel 2.

Pertanyaan yang diajukan kepada responden berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki untuk masing-masing jabatan atau tugas di kapal sesuai standar kompetensi. Jawaban yang diberikan oleh responden dapat memberikan gambaran dan penilaian unit kompetensi yang telah ada. Berdasarkan jawaban responden penilaian dilakukan oleh peneliti dengan skala penilaian menjadi dua, yaitu YA dan TIDAK. YA menggambarkan responden dapat menjawab pertanyaan sesuai unit kompetensi, sedangkan TIDAK menggambarkan responden tidak tahu atau tidak bisa menjawab pertanyaan sesuai unit kompetensi yang tersedia.

Unit kompetensi ABK sesuai SKKNI terdapat unit kompetensi yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan sehingga unit tersebut diabaikan. Unit kompetensi yang tidak sesuai adalah melakukan perawatan alat penangkapan ikan berbahan utama tali dan pancing di darat.

Uji Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan yang diberikan telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Hal tersebut untuk mendapatkan validitas isi yang memadai, untuk butir-butir pertanyaan yang kurang memadai direvisi. Selanjutnya diadakan uji coba untuk mengetahui reliabilitas instrumen. Koefisien reliabilitas untuk skorbutir dikotomi dapat dihitung dengan menggunakan rumus *Kuder-Richardson* yang dikenal dengan nama KR-20 (Djaali et al., 2000):

$$KR-20 = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum p_i q_i}{S_t^2} \right)$$

Keterangan/Remarks:

- k : Cacah butir/*Chopped grain*
- $p_i q_i$: Varians skor butir/*Variance score grain*
- p_i : Proporsi jawaban yang benar untuk butir nomor *i*/*Proportion of correct answers for the item number i*
- q_i : Proporsi jawaban yang salah untuk butir nomor *i*/*The proportion of wrong answers for the item number i*
- S_t^2 : Varians skor total responden/ *Variance score total respondents*

Tabel 1. Unit Kompetensi Nakhoda Kapal Penangkap Ikan (Rawai Tuna).

Table 1. Competency Unit of Fishing Vessel Captain (Tuna Longline).

No	Unit Kompetensi/ Competency Unit
1	Merencanakan operasi penangkapan ikan/ <i>Fishing operation plan</i>
2	Menyiapkan kelaiklautan kapal/ <i>Seaworthiness of ship</i>
3	Menyiapkan kelaikan operasi penangkapan ikan/ <i>Fishing operation Worthiness</i>
4	Melaksanakan tugas jaga laut/ <i>Watchkeeping</i>
5	Melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan rawai tuna/ <i>Fishing at sea by tuna longline</i>

Sumber: Kemnakertrans No. 98 Tahun 2013/Source: Kemnakertrans No.98 Year 2013

Tabel 2. Unit Kompetensi Anak Buah Kapal (Rawai Tuna).

Table 2. Competency Unit of Fishing Vessel Crew (Tuna Longline).

No	Unit Kompetensi/ Competency Unit
1	Merakit rawai tuna/ <i>Assemble Longline Tuna</i>
2	Melakukan perawatan alat penangkapan ikan berbahan utama tali dan pancing di darat/ <i>Hook and line fishing gear maintenance and protection at land</i>
3	Melakukan perawatan alat penangkapan ikan berbahan utama tali dan pancing di laut/ <i>Hook and line fishing gear maintenance and protection at sea</i>
4	Melakukan perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing/ <i>Hook and line fishing gear reparation</i>
5	Melakukan penanganan ikan tuna di kapal/ <i>Handling tuna on board</i>

Sumber: Kemnakertrans No.98 Tahun 2013/Source: Kemnakertrans No. 98 Year 2013

Nilai reliabilitas yang didapatkan lebih besar dari nilai r Tabel, hal ini menyatakan bahwa instrument penelitian (daftar pertanyaan wawancara) yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Berdasarkan kategori koefisien reliabilitas menurut Guilford (1956) dalam Priatna (2008) nilai reliabilitas dari nakhoda termasuk dalam kategori reliabilitas tinggi dan kompetensi ABK termasuk dalam kategori reliabilitas sedang.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada responden dengan pertanyaan yang telah disiapkan. Data sekunder diperoleh dari Kantor PPN Palabuhanratu dan Dinas Kelautan Perikanan Palabuhanratu.

Wawancara dilakukan pada saat nelayan berada di pelabuhan. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara melihat simulasi kegiatan, dokumen-dokumen kapal dan menanyakan sertifikat yang telah dimiliki oleh nelayan yang bersangkutan. Selain itu kompetensi nelayan dapat juga diketahui dari pendapat teman ataupun atasan kerja.

Peneliti menentukan sampel unit penangkapan berupa kapal rawai tuna yang berlabuh dan bertambat di PPN Palabuhanratu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan atau dapat mewakili objek yang akan diteliti (Effendi dan Tukiran, 2012). Pemilihan sampling kapal rawai tuna didasarkan dengan pertimbangan nakhoda dan anggota kapal yang ada dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat diwawancarai. Penggunaan unit penangkapan sebagai sampel dalam penelitian ini untuk mengetahui struktur jabatan beserta tugas dari masing-masing anggota kapal dan mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh ABK dari nakhoda kapal.

Jumlah nelayan yang bekerja pada kapal rawai tuna berkisar 10-14 orang. Pemilihan nelayan yang diwawancarai dengan pertimbangan jabatan dan kesibukan nelayan saat wawancara. Sampel kapal rawai tuna yang didapatkan berjumlah 10 kapal dan nelayan yang telah diwawancara yaitu; 10 orang nakhoda, 3 orang KKM, 22 orang anggota kapal yang terdiri dari 4 orang boatswain, 2 orang wakil nakhoda, 14 orang anak buah, 1 orang koki dan 1 orang prosesing. Selain itu wawancara yang

berkaitan dengan kompetensi nelayan dengan pihak perusahaan, DKP Palabuhanratu dan Syahbandar Perikanan PPN Palabuhanratu telah dilakukan.

Analisis Data

Analisis yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara kompetensi nelayan rawai tuna di PPN Palabuhanratu dengan SKKNI menggunakan metode analisis kesenjangan (Gap). Pengukuran kompetensi dapat diukur dari ada atau tidaknya kesenjangan yang terjadi antara kompetensi standar dan kompetensi aktual (Ramadhan *et al.*, 2014). Analisis kesenjangan dilakukan dengan menilai langsung kompetensi nelayan di lapangan dengan menggunakan skala dikotomi (0 : Tidak dan 1 : Ya). Kesenjangan kompetensi adalah perbedaan antara level kompetensi yang diperlukan pada suatu posisi dan level kompetensi saat ini. Nilai gap menunjukkan bahwa responden belum memiliki kompetensi sesuai dengan standar. Sedangkan nilai gap 0 menunjukkan responden telah memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang ada. Menurut Palan (2007) kesenjangan dihitung dengan rumus:

$$\text{Kesenjangan (Gap)} = -(CL_R - CL_C)$$

$$\text{Kompetensi Tercapai} = (\sum CL_C) / (\sum CL_R) \times 100\%$$

Keterangan/ *Remaks* :

Current Competency Level (CL_C): Kompetensi saat ini; $\bar{u}_1 + \bar{u}_2 + \dots + \bar{u}_i$ dimana i adalah unit kompetensi ke i dari nakhoda atau ABK/ *Competency today*; $U_1 + U_2 + \dots + U_i$ where i is a unit of competency to i of the skippers or crew

Required Competency Level (CL_R): Nilai kompetensi maksimum yang diperlukan/ *The value of the maximum required competence*

Analisis yang digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan kompetensi menggunakan analisis matriks perbandingan berpasangan dengan menggunakan rata-rata aritmetik (Saaty, 1987). Vektor prioritas (VP) dinilai dengan cara membandingkan unit kompetensi dengan skala 1 – 9. Setiap unit memiliki elemen kompetensi dan tingkat kepentingannya dihitung dengan cara mengkali nilai VP elemen kompetensi dengan VP unit kompetensi. Langkah- langkah untuk membuat matriks perbandingan berpasangan sebagai berikut:

1. Menjumlahkan nilai-nilai dalam setiap kolom (Nkj).

2. Membagi setiap entri dalam setiap kolom dengan jumlah pada kolom untuk memperoleh matriks yang dinormalisasi (N_{dij}).
3. Vektor prioritas dari setiap elemen, diperoleh dengan merata-ratakan nilai sepanjang baris (V_{pi})

$$V_{pi} = \sum_{j=1}^n \frac{N_{dij}}{n}$$

Keterangan/ Remaks :

N_{dij} : Nilai setiap entri dalam matriks yang dinormalisasi pada baris i dan kolom j/ *Value of each entry in matrix that normalized in row i and column j*

a_{ij} : Nilai setiap entri dalam matriks pada baris i dan kolom j/ *Value of each entry in matrix in row i and column j*

N_{kj} : Nilai kolom ke j/ *Value column j*

V_{pi} : Vektor prioritas dari elemen i/ *Priority vector of element i*

4. Menghitung nilai Indeks Konsistensi (CI) dan Rasio Konsistensi (CR)

Pendidikan dan pengalaman melaut responden dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan cara mentabulasi data ke dalam tabellalu dianalisis. Analisis data kuantitatif dilakukan pengujian dengan menggunakan uji statistik non-parametrik pada penelitian ini menggunakan rumus persentase:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan/ Remaks:

P : Persentase jawaban/ *Answer percentage*

f : Jumlah frekuensi yang diberikan/ *The number of frequencies*

n : Jumlah responden/ *The number of respondents*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi Nakhoda

Kompetensi nakhoda memiliki 20 elemen kompetensi, 10 elemen kompetensi tercapai penuh. Elemen kompetensi nakhoda yang memiliki nilai kesenjangan ditunjukkan pada Tabel 3.

Nilai kesenjangan terendah terjadi pada elemen Menghitung waktu operasi penangkapan ikan dengan nilai gap 0,03. Pada elemen tersebut kesenjangan terjadi karena nakhoda tidak diberikan kewenangan untuk menentukan waktu operasi penangkapan oleh pihak perusahaan. Penentuan lama operasi penangkapan disesuaikan dengan bahan perbekalan yang dibawa dan permintaan perusahaan. Pihak perusahaan biasanya menentukan lama operasi penangkapan tergantung dengan harga ikan. Selain itu nakhoda tidak terbiasa mencatat seluruh kebutuhan perbekalan yang dibawa ataupun yang sisa sehingga pada elemen Mendokumentasikan rencana operasi penangkapan memiliki nilai gap 0,45.

Nakhoda rawai tuna di PPN Palabuhanratu tidak memiliki kompetensi Melengkapi dokumen kapal dan Melengkapi dokumen perijinan yang terkait dengan usaha penangkapan ikan, sehingga kesenjangan pada kedua elemen tersebut bernilai 0,93 dan 0,90. Hal tersebut karena seluruh perijinan keberangkatan dan kedatangan telah dilakukan oleh pihak perusahaan. Nakhoda tidak mengerti pengurusan dokumen yang diperlukan, seperti Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Surat Ukur Kapal, Surat Tanda Pendaftaran Kapal (*Certificate of Tonnage and Measurement*), Surat Kebangsaan Kapal, Sertifikat garis muat kapal (*Load Line Certificate*) dan sertifikat hapus tikus (*Derating certificate*).

Nilai kesenjangan juga terjadi pada elemen Memantau rute, pengendalian kapal dan keamanan berlayar. Pada elemen ini nakhoda kurang mengerti tentang peraturan pelayaran dan keselamatan di laut. Karakteristik pekerjaan pada kapal penangkap ikan berbeda dengan kapal niaga atau kapal lainnya. Menurut Suwardjo *et al.* (2010) keselamatan kapal penangkap ikan merupakan interaksi faktor-faktor yang kompleks, yakni *human factor* (nakhoda dan anak buah kapal), *machines* (kapal dan peralatan keselamatan) dan *enviromental* (cuaca dan skim pengelolaan sumberdaya perikanan). Permasalahan keselamatan atau kecelakaan akan timbul apabila minimum satu elemen dari *human factor*, *machines* atau *enviromental factor* tersebut tidak berfungsi. Kompetensi nakhoda tentang keselamatan kapal ikan pada elemen ini sangat perlu ditingkatkan, mengingat pengetahuan tentang keselamatan kapal penangkap ikan masih kurang.

Tabel 3. Nilai Kesenjangan Elemen Kompetensi Nakhoda.
Table 3. Gap Value of Captain Competency Elements.

No	Elemen kompetensi/ Competency element	CL _R	CL _C	Kesenjangan/ Gap
1. Merencanakan Operasi Penangkapan Ikan / <i>Fishing Operation Plan</i>				
a	Menentukan jenis ikan sasaran, alat penangkap ikan dan daerah penangkapan ikan/ <i>Determining target species, fishing gear and fishing area</i>	1	1	0
b	Memprakirakan cuaca / <i>Forecasting Weather</i>	1	1	0
c	Menghitung waktu operasi dan kebutuhan operasi/ <i>Calculating time and requirement fishing operation</i>	1	0.98	0.03
d	Mendokumentasikan rencana operasi penangkapan/ <i>Documenting fishing operation plan</i>	1	0.55	0.45
2. Menyiapkan kelaiklautan kapal/ <i>Seaworthiness of Ship</i>				
a	Melengkapi dokumen kapal/ <i>Completing vessel document</i>	1	0.08	0.93
b	Melengkapi jumlah awak kapal sesuai kualifikasi dan fungsinya/ <i>Completing number of qualified crew and function</i>	1	1	0
c	Melengkapi perlengkapan keselamatan kapal dan manusia / <i>Completing safety equipment board and human</i>	1	0.60	0.40
d	Melaporkan keberangkatan kapal ke syahbandar perikanan dan syahbandar umum/ <i>Reporting the vessel departure to the fisheries and public harbour master</i>	1	0.70	0.30
3. Menyiapkan Kelaikan Operasi Penangkapan Ikan/ <i>Fishing Operation Worthiness</i>				
a	Melengkapi dokumen perijinan yang terkait dengan usaha penangkapan ikan/ <i>Completing permits documents relating to fishing buisness</i>	1	0.10	0.90
b	Melengkapi kebutuhan perbekalan kapal dan awak kapal/ / <i>Completing the requairment of crewaman and vessel stock</i>	1	0.88	0.13
c	Menyiapkan alat dan perlengkapan penangkap ikan/ <i>Preparing tools and fishing equipment</i>	1	1	0
4. Melaksanakan Dinas Jaga Laut/ <i>Watchkeeping</i>				
a	Menyiapkan perlengkapan dinas jaga laut/ <i>Preparing watchkeeping equipment</i>	1	1	0
b	Memantau rute, pengendalian kapal dan keamanan berlayar/ <i>Monitoring route, control and safety sailing vessel</i>	1	0.76	0.24
5. Melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan rawai tuna/ <i>Fishing at Sea By Tuna Longline</i>				
a	Menentukan haluan dan posisi seting/ <i>Determining position and direction setting</i>	1	0.45	0.55
b	Menentukan kedalaman pancing/ <i>Determining Hook Depth</i>	1	0.83	0.17
c	Melakukan persiapan ikan umpan, alat dan perlengkapan/ <i>Preparing fishbait, tools and equipment</i>	1	1	0
d	Menurunkan rawai tuna / <i>Setting</i>	1	1	0
e	Menghanyutkan rawai tuna/ <i>Driffting</i>	1	1	0
f	Menaikkan, mengambil ikan hasil tangkapan dan menyusun kembali rawai tuna ikan hasil tangkapan / <i>Hauling</i>	1	1	0
g	Menata Alat/ <i>Put fishing equipment</i>	1	1	0

Sumber: Data primer diolah (2015) / Source: Primary data processed (2015)

Keseluruhan unit kompetensi nakhoda rawai tuna yang dimiliki saat ini belum mencapai standar (Tabel 4). Unit kompetensi yang masih perlu ditingkatkan adalah Menyiapkan kelaiklautan kapal dan Menyiapkan kelaikan operasi penangkapan ikan. Peningkatan kompetensi pada elemen tersebut dapat dilakukan dengan cara pelatihan

yang berkaitan dengan dokumen kapal dan usaha penangkapan. Selain itu perlu adanya aturan yang mewajibkan nakhoda melapor kepada syahbandar perikanan secara langsung, sehingga nakhoda dapat memahami prosedur perijinan sebelum dan setelah melaut.

Setiap kapal penangkap ikan yang berlayar harus berdinis seorang nakhoda dan beberapa perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut dan sertifikat keterampilan dasar pelaut sesuai dengan daerah pelayaran, ukuran kapal, dan daya penggerak kapal. Jenis sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan terdiri dari: 1) Sertifikat keahlian pelaut nautika kapal penangkap ikan; 2) Sertifikat keahlian pelaut teknik permesinan kapal penangkap ikan. (Peraturan Pemerintah (PP). No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan). Sertifikat keahlian ANKAPIN III yang wajib dimiliki nakhoda kapal rawai tuna dengan ukuran panjang kurang dari 12 meter pada daerah pelayaran tidak lebih dari 60 mil dari garis pantai di perairan Indonesia tidak termasuk ZEEI. Seluruh nakhoda kapal rawai

tuna di PPN Palabuhanratu memiliki sertifikat wajib yaitu SKK 60 mill, dan hanya sebagian kecil yang memiliki sertifikat ANKAPIN III. Namun sertifikat tersebut didapatkan tanpa pelatihan dan pengujian kompetensi yang terstandar terlebih dahulu.

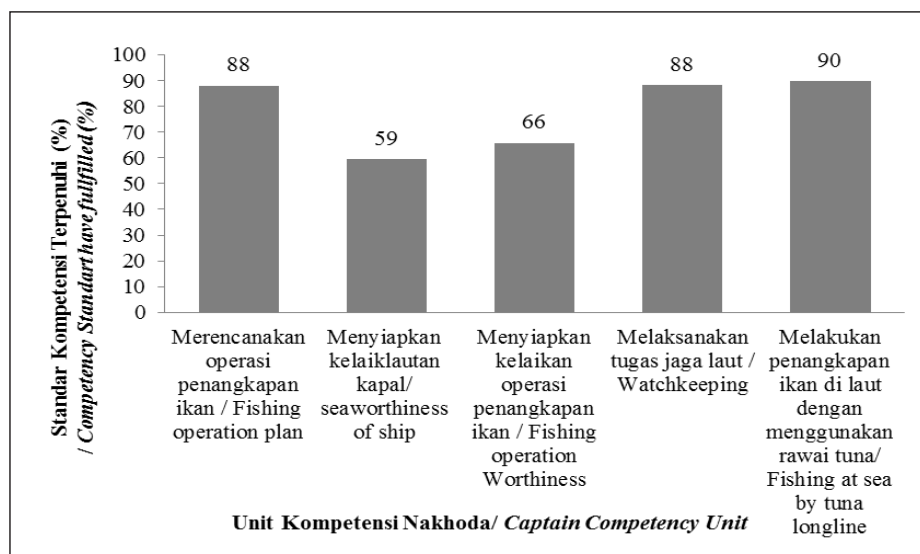
Berdasarkan Gambar 2 dapat terlihat unit kompetensi nakhoda yang telah terpenuhi dalam satuan persentase. Nilai persentase yang mendekati 100% dapat diartikan memiliki kompetensi yang telah memenuhi standar. Unit melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan rawai tuna memiliki nilai persentase tertinggi yaitu 90%. Unit kompetensi yang terendah adalah unit Menyiapkan kelaiklautan kapal dengan persentase 59% dan unit Menyiapkan kelaikan operasi penangkapan ikan memiliki nilai 66%.

Tabel 4. Nilai Kesenjangan Unit Kompetensi Nakhoda.

Table 4. Gap Value of Captain Competency Unit.

No	Unit Kompetensi/Competency Unit	Total CL _R	Total CL _C	Total GAP	Kompetensi Terpenuhi (%) / Competence Fulfilled (%)
1	Merencanakan operasi penangkapan ikan/ <i>Fishing operation plan</i>	4	3.53	0.48	88
2	Menyiapkan kelaiklautan kapal/ <i>Seaworthiness of ship</i>	4	2.38	1.63	59
3	Menyiapkan kelaikan operasi penangkapan ikan/ <i>Fishing operation Worthiness</i>	3	1.98	1.03	66
4	Melaksanakan tugas jaga laut/ <i>Watchkeeping</i>	2	1.76	0.24	88
5	Melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan rawai tuna/ <i>Fishing at sea by tuna longline</i>	7	6.28	0.72	90

Sumber: Data primer diolah (2015) / Source: Primary data processed (2015)



Gambar 2. Persentase Unit Kompetensi Nakhoda
Figure 2. Percentage of Captain Competency Unit

Kompetensi ABK

Kompetensi ABK memiliki 13 elemen kompetensi dan seluruh elemen belum tercapai penuh. Berikut ini nilai kesenjangan elemen kompetensi ABK ditunjukkan pada Tabel 5.

Elemen kompetensi ABK yang memiliki nilai kesenjangan terendah adalah elemen Memperbaiki tali temali yang rusak dengan nilai 0,07. Sebagian besar ABK memiliki kompetensi tersebut, namun

kesenjangan terjadi disebabkan adanya ABK yang baru mengikuti operasi penangkapan sehingga belum mampu memperbaiki tali temali yang rusak.

Elemen kompetensi Memberikan zat pengawet dan pewarna pada tali temali menjadi elemen kompetensi ABK yang memiliki nilai kesenjangan tertinggi. Kesenjangan tersebut terjadi disebabkan sebagian besar ABK yang menjadi responden tidak mengetahui manfaat pemberian warna dan zat pengawet pada tali

Tabel 5. Nilai Kesenjangan Elemen Kompetensi ABK.

Table 5. Gap Value of Crew Competency Elements.

No	Elemen Kompetensi/ Competency Element	CL _R	CL _C	Kesenjangan/ Gap
1.	Merakit rawai tuna/ Assemble Longline Tuna			
a	Menjabarkan desain rawai tuna/ Explaining tuna longline desain	1	0.66	0.34
b	Menyiapkan peralatan kerja dan kebutuhan bahan rawai tuna/ Preparing work equipment and require material longline tuna	1	0.67	0.33
c	Merangkai komponen rawai tuna/ Assembling tuna longline component	1	0.68	0.32
2.	Melakukan perawatan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di laut/ Hook and line fishing gear maintenance and protection			
a	Melakukan persiapan jenis perawatan dan pencegahan kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing/ Preparing type of fishing gear treatment and prevention of damage made from hook and line material	1	0.91	0.09
b	Menyiapkan jenis, bahan dan jumlah peralatan perawatan dan pencegah kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di kapal/ Preparing type, material, and equipment maintenance and prevention of damage to the fishing gear made from hook and line material	1	0.77	0.23
c	Melakukan perawatan dan pencegahan kerusakan alat penangkap ikan di kapal/ Treatment and prevention fishing gear of damage on board	1	0.82	0.18
3.	Melakukan perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing/ Hook and line fishing gear reparation			
a	Menghindarkan kerusakan yang diakibatkan oleh sinar matahari langsung, minyak, zat kimia berbahaya dan hewan pengerat/ Avoid damage caused by direct sun light, oil, hazardous chemical and rodents	1	0.76	0.24
b	Memperbaiki tali temali yang rusak/ Repairing ropes	1	0.93	0.07
c	Mengganti komponen alat lainnya yang rusak/ Replacing defective equipment component	1	0.91	0.09
d	Memberikan zat pengawet dan pewarna pada tali temali/ Giving preservatives and coloring in ropes	1	0.23	0.77
4.	Melakukan penanganan ikan tuna di kapal/ Handling tuna on board			
a	Menyiapkan peralatan dan tempat penanganan ikan tuna hasil tangkapan di kapal/ Preparation equipment and place for handling tuna on board	1	0.82	0.18
b	Menyiapkan sistem penyimpanan/ Preparing storage system	1	0.33	0.67
c	Menangani ikan tuna/ Handling tuna	1	0.83	0.17

Sumber: Data primer diolah (2015) /Source: Primary data processed (2015)

temali, sehingga tali temali yang digunakan tidak menggunakan zat pewarna dan pengawet. Elemen kompetensi yang memiliki nilai gap cukup tinggi adalah elemen Menyiapkan sistem penyimpanan. Sistem penyimpanan yang digunakan adalah palka yang berisi air. ABK kurang memahami sistem pendinginan (*chilling*), pembekuan (*freezing*) dan pembuatan lapisan es dengan proses pencelupan (*glazing*). ABK hanya mengetahui prosedur yang telah diberikan oleh perusahaan, yaitu setelah ikan tuna dibersihkan kemudian dibungkus plastik dan dimasukkan ke dalam palka berisi air.

Unit kompetensi ABK pada penelitian ini termasuk seluruh anggota kapal, yaitu wakil nakhoda, boatswain, koki dan penanganan tuna. Selain KKM seluruh anggota kapal wajib melakukan pekerjaan di atas dek yang berkaitan dengan operasi penangkapan ikan. Keseluruhan unit kompetensi ABK rawai tuna yang dimiliki saat ini belum mencapai standar (Tabel 6). Kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh ABK dapat juga dilihat dari belum ada yang memiliki sertifikat kompetensi yang telah teruji.

Unit Kompetensi ABK yang perlu ditingkatkan adalah unit Merakit rawai tuna dan unit Melakukan penanganan ikan tuna di kapal. ABK belum memiliki kompetensi merakit rawai tuna yang memenuhi standar. Bentuk dan desain alat tangkap rawai tuna ditentukan oleh nakhoda oleh karena itu ABK rawai tuna di PPN Palabuhanratu tidak mengetahui desain alat tangkap keseluruhan. ABK hanya bertugas merakit komponen rawai tuna yang akan

digunakan dalam operasi penangkapan.

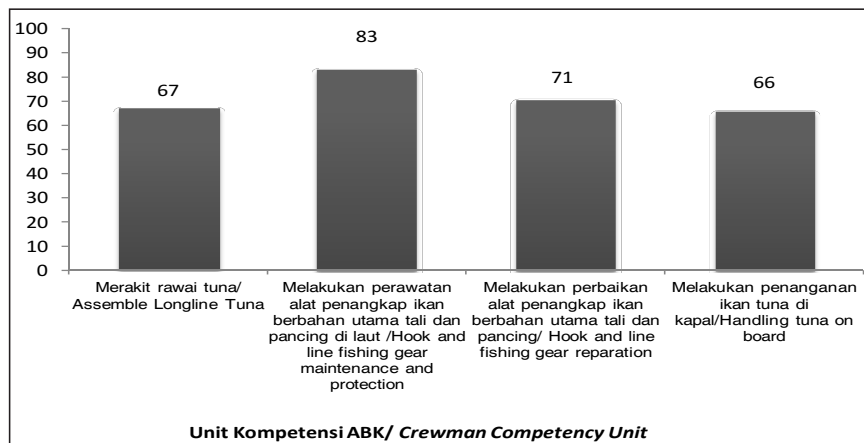
Persyaratan HACCP (*Hazard Analyze Critical Control Point*) yang dipengaruhi langsung oleh kompetensi ABK adalah operasional penanganan tuna segar. Pada proses ini ABK telah melakukan prosedur penanganan ikan tuna dengan cukup baik, dimana proses tersebut dilakukan secara cepat serta kondisi dek selalu dibersihkan dengan menyemprotkan air. Unsur lain yang sangat dipengaruhi oleh kompetensi ABK adalah sanitasi dan kesehatan pekerja. Kesehatan dan kebersihan ABK pada saat penanganan ikan tuna di atas kapal belum memenuhi standar. Penerapan HACCP dalam penanganan ikan tuna memiliki kelayakan persyaratan dasar mencakup 6 unsur yaitu 1) lokasi dan lingkungan; 2) desain dan konstruksi kapal serta fasilitas; 3) peralatan dan perlengkapan penanganan; 4) operasional penanganan tuna segar; 5) sanitasi dan kesehatan pekerja; dan 6) sistem manajemen mutu (Iskandar *et al.*, 2011).

Unit kompetensi ABK telah memenuhi 50% standar kompetensi yang seharusnya. Unit kompetensi dengan nilai persentase tertinggi adalah melakukan perawatan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di laut dengan nilai 83%. Pada unit merakit rawai tuna dan melakukan penanganan ikan tuna di kapal memiliki nilai persentase 67% dan 66%. Sedangkan kompetensi yang terpenuhi pada unit melakukan perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing sebesar 71% (Gambar 3).

Tabel 6. Nilai Kesenjangan Unit Kompetensi ABK.
Table 6. Gap Value of Crew Competency Unit.

No	Unit Kompetensi/ Competency Unit	Total CL _R	Total CL _C	Total GAP	Kompetensi Terpenuhi (%)/ Competence Fulfilled (%)
1	Merakit rawai tuna/ <i>Assemble Longline Tuna</i>	3	2.01	0.99	67
2	Melakukan perawatan alat penangkapan ikan berbahan utama tali dan pancing di laut/ <i>Hook and line fishing gear maintenance and protection</i>	3	2.50	0.50	83
3	Melakukan perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing/ <i>Hook and line fishing gear reparation</i>	4	2.83	1.17	71
4	Melakukan penanganan ikan tuna di kapal / <i>Handling tuna on board</i>	3	1.98	1.02	66

Sumber: Data primer diolah (2015)/Source: Primary data processed (2015)



Gambar 3. Persentase Unit Kompetensi ABK
Figure 3. Percentage of Crew Competency Unit

Tingkat Kepentingan Kompetensi

Tingkat kepentingan kompetensi adalah nilai prioritas dari unit dan elemen kompetensi yang perlu dipenuhi. Peningkatan kompetensi perlu dilakukan pada seluruh unit dan elemen kompetensi Nakhoda dan ABK. Perhitungan tingkat kepentingan dapat menjadi dasar dalam membuat strategi peningkatan kompetensi. Berikut ini adalah tingkat kepentingan unit kompetensi nakhoda dan tingkat kepentingan unit kompetensi ABK (Tabel 7 dan Tabel 8).

Unit kompetensi terpenting dari nakhoda adalah unit Melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan rawai tuna. Nilai kesenjangan pada unit ini menjadi nilai kesenjangan yang terendah pada unit kompetensi nakhoda dan nilai kompetensi tercapai sebanyak 90%. Hal itu menggambarkan kompetensi pada unit Melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan rawai tuna sudah baik namun masih ada elemen yang perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai kesenjangan pada unit ini diperlukan pelatihan terkait dengan Menentukan haluan dan posisi

setting; dan Menentukan kedalaman pancing. Peningkatan kompetensi pada kedua unit tersebut akan meningkatkan produksi dengan bertambahnya hasil tangkapan tuna yang didapatkan sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Nakhoda.

Unit Kompetensi terpenting dari ABK adalah unit Melakukan penanganan ikan tuna di kapal. Nilai kesenjangan pada unit ini memiliki nilai besar dan kompetensi tercapai pada unit ini hanya 66 persen. Hal ini menggambarkan kompetensi pada unit yang terpenting sangat kurang dan perlu di tingkatkan. Pada unit ini nilai kesenjangan terjadi pada semua elemen sehingga diperlukan pelatihan terkait dengan 1) Menyiapkan peralatan dan tempat penanganan ikan tuna hasil tangkapan di kapal; 2) Menyiapkan sistem penyimpanan; 3) Menangani ikan tuna. Unit ini sangat berkaitan dengan menjaga mutu ikan tuna yang didapat pada saat awal penangkapan hingga pendaratan. Mutu ikan tuna yang baik tentunya akan meningkatkan harga jual sehingga dapat mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh ABK.

Tabel 7. Tingkat Kepentingan Unit Kompetensi Nakhoda.

Table 7. Importance Level Captain Competency Unit.

No	Unit Kompetensi/ Competency Unit	Vektor Prioritas/Priority Vector
1	Merencanakan operasi penangkapan ikan/ Fishing operation plan	0.26
2	Menyiapkan kelaiklautan kapal/ Seaworthiness of ship	0.11
3	Menyiapkan kelaikan operasi penangkapan ikan/ Fishing operation Worthiness	0.11
4	Melaksanakan tugas jaga laut/ Watchkeeping	0.17
5	Melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan rawai tuna/ Fishing at sea by tuna longline	0.35

Sumber: Data primer diolah (2015)/Source: Primary data processed (2015)

Tabel 8. Tingkat Kepentingan Unit Kompetensi ABK.
Table 8. Importance Level Crew Competence Unit.

No	Unit Kompetensi/ Competency Unit	Vektor Prioritas/ Priority Vector
1	Merakit rawai tuna/ Assemble Longline Tuna	0.21
2	Melakukan perawatan alat penangkapan ikan berbahan utama tali dan pancing di laut/ Hook and line fishing gear maintenance and protection	0.16
3	Melakukan perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing/ Hook and line fishing gear reparation	0.21
4	Melakukan penanganan ikan tuna di kapal / Handling tuna on board	0.42

Sumber: Data primer diolah (2015)/Source: Primary data processed (2015)

Pendidikan Nelayan Rawai Tuna

Karakteristik pendidikan dalam penelitian ini adalah jumlah tahun nelayan mengikuti pendidikan formal yaitu dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga sekolah tinggi. Gambar 4 menunjukkan mayoritas pendidikan formal yang dimiliki oleh nelayan rawai tuna adalah sekolah dasar. Sedangkan masih ada nelayan rawai tuna yang tidak pernah mengikuti jenjang sekolah formal yaitu sebanyak 9% dari total responden 35 orang.

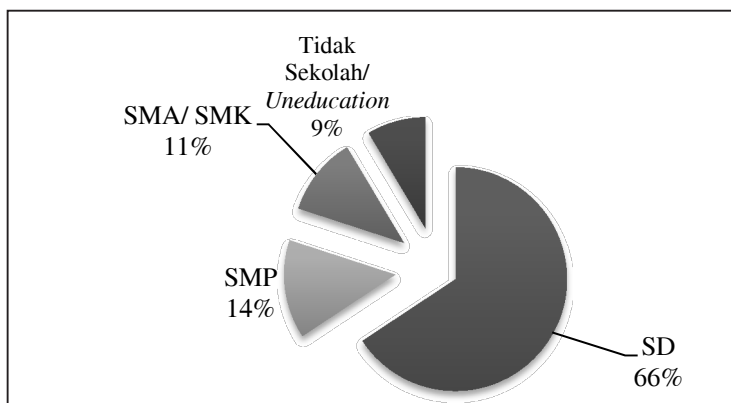
Pendidikan non formal yang diikuti oleh responden seperti pelatihan masih kurang. Materi pelatihan yang terkait operasi penangkapan ikan masih sedikit. Pelatihan biasanya diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) yang tersebar di Indonesia, beberapa contoh balai pelatihan yaitu; BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi dan BPPP Ambon. Balai pelatihan tersebut juga menjadi tempat uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikat Perikanan dan Kelautan (LSP-KP). Kurangnya pelatihan dan uji kompetensi bagi nelayan disebabkan sedikitnya pelatihan yang tersedia dan terbatas jumlah peserta. Selain itu terkadang sulit mendapatkan ijin dari pihak perusahaan untuk

mengikuti pelatihan karena membutuhkan waktu yang cukup lama.

Pelatihan yang diberikan dapat melalui sosialisasi terlebih dahulu mengenai peraturan sertifikat yang harus dimiliki bagi awak kapal dan uji kompetensi. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan oleh pelabuhan perikanan atau dinas perikanan setempat. Sosialisasi bagi nelayan dengan pendekatan bahwa kompetensi dapat menambah pendapatan, sehingga nelayan tertarik untuk mengikuti. Selain itu biaya untuk uji kompetensi yang dilakukan diharapkan dapat lebih terjangkau.

Pengalaman Nelayan Rawai Tuna

Karakteristik pengalaman di laut dalam penelitian ini adalah lamanya nelayan menangkap ikan di laut dari awal penangkapan hingga penelitian ini dilakukan dan dinyatakan dalam tahun. Terdapat tiga kategori untuk karakteristik pengalaman melaut menurut Hamzens (2007) yaitu kategori rendah dimana nelayan telah melakukan penangkapan ikan selama 1-4 tahun. Kategori sedang yaitu nelayan telah melakukan penangkapan ikan selama 5-10 tahun, sedangkan kategori tinggi yaitu nelayan telah melakukan penangkapan ikan di laut selama >10 tahun.



Gambar 4. Presentase Pendidikan Formal Nelayan Rawai Tuna
Figure 4. Percentage of Tuna Longline Fishers Formal Education

Tabel 9. menunjukkan nelayan rawai tuna yang menjadi responden dalam penelitian ini mayoritas telah melakukan penangkapan ikan di laut selama 5 – 10 tahun. Total 35 responden yang telah diwawancarai, ada sebanyak 11 orang responden yang sangat berpengalaman di laut karena telah melakukan penangkapan ikan selama >10 tahun. Rendahnya pendidikan formal yang dimiliki oleh nelayan dan kurangnya pelatihan terkait dengan pengoperasian rawai tuna dapat menggambarkan kualitas nelayan tersebut. Namun dengan tersedianya KKNi sebagai kerangka penjenjangan kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja, kompetensi nelayan dapat digambarkan dengan pengalaman nelayan di laut.

Sebagian besar ABK yang baru mengikuti operasi penangkapan mendapatkan pelajaran mengoperasikan alat tangkap dari rekan kerja yang terlebih dahulu. Hal yang serupa juga dirasakan oleh nakhoda kapal, pelajaran dalam pengoperasian rawai tuna dari persiapan keberangkatan menuju DPI hingga kembali ke pelabuhan didapatkan dari nakhoda yang terdahulu. Menurut Hamzens (2007) terdapat beberapa contoh pengalaman yang diperoleh secara alamiah selama menjadi nelayan yaitu: (1) pengenalan kondisi dan gejala-gejala alam, khususnya laut,; (2) cara-cara menangkap ikan berdasarkan kebiasaan, pengalaman orang tua, atau sanak keluarga, teman, yang juga nelayan dan (3) cara menangani hasil tangkapan.

Pendapatan Nelayan Rawai Tuna

SKKNI tentunya diharapkan dapat menjadi tolak ukur pendapatan nelayan, dimana standar kompetensi dapat menentukan gaji yang diperoleh oleh nelayan. Nelayan dengan kompetensi yang baik akan mendapatkan pendapatan yang lebih. Namun kompetensi yang dimiliki oleh nelayan

saat ini belum bersertifikat, sehingga cukup sulit untuk menjadikan kompetensi sebagai dasar untuk pendapatan nelayan.

Pendapatan nelayan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penghasilan selama nelayan mengikuti operasi penangkapan dengan kapal rawai tuna. Pendapatan nelayan rawai tuna di PPN Palabuhanratu menggunakan sistem gaji per hari, selama proses kegiatan penangkapan sekitar 5-6 bulan di laut. Gaji yang diterima nelayan berbeda-beda tergantung sistem yang diberikan oleh perusahaan dan setiap anggota kapal rawai tuna memiliki gaji berbeda sesuai jabatannya.

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada pihak perusahaan dan nakhoda, setiap perusahaan berbeda dalam memberikan gaji dan bonus kepada nakhoda. Perusahaan biasanya memberikan selisih gaji sebesar Rp. 5000 setiap tingkatan jabatan anggota kapal. Tingkat jabatan anggota kapal tentunya dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki nelayan tersebut. Jenjang karir dari nelayan rawai tuna diawali dari posisi ABK jika sudah berpengalaman dalam penangkapan kemudian naik menjadi boatswain. Apabila memiliki kemampuan dalam proses penanganan ikan, maka akan menjadi bagian penanganan tuna. ABK yang memiliki ketrampilan dalam merawat dan memperbaiki kapal dapat diangkat menjadi Kepala Kamar Mesin (KKM). Selain itu dapat naik menduduki posisi jabatan sebagai wakil nakhoda. Apabila telah mahir dalam mengemudikan kapal serta mendapat kepercayaan oleh pihak perusahaan maka akan menduduki posisi nakhoda kapal.

Nakhoda kapal mendapatkan gaji berkisar Rp. 100.000 – 250.000 per hari dan mendapatkan tambahan 15% dari keuntungan. Pemberian bonus apabila hasil tangkapan yang didapat banyak dan berkualitas, bonus yang didapat Rp. 1000/ekor. Wakil nakhoda mendapatkan gaji berkisar Rp. 40.000 – Rp. 65.000/ hari. KKM mendapatkan

Tabel 9. Jumlah Responden Berdasarkan Pengalaman Nelayan di Laut.
Table 9. Number of Fishers Based on Fishing Experience.

No	Kategori/Category	Jumlah/ Sum (Orang/ People)	Presentase (%) / Percentage (%)
1	Kurang berpengalaman/Less experience	9	25.7
2	Cukup Berpengalaman/Sufficient experience	15	42.9
3	Sangat Berpengalaman/ Very experience	11	31.4
Jumlah/Total		35	100

Sumber: Data primer diolah (2015) /Source: Primary data processed (2015)

gaji Rp. 55.000 – 60.000/ hari, sedangkan boatswain, ABK, koki dan prosesing tuna berkisar mendapatkan gaji sekitar Rp. 35.000 – 45.000/ hari.

Gaji biasanya akan diberikan setelah kegiatan operasi selama 5-6 bulan selesai, akan tetapi nelayan dapat meminta sebagian dari gaji untuk kebutuhan keluarga di rumahnya. Jika ada kebutuhan keluarga yang mendesak anggota kapal hanya tinggal mengutarakan kepada nakhoda kemudian nakhoda yang akan menyampaikan kepada pihak perusahaan. Uang dapat diberikan langsung kepada pihak keluarga ataupun melalui transfer bank.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Kompetensi nakhoda dan ABK rawai tuna yang dimiliki saat ini sudah mencapai 50% dari SKKNI. Kompetensi nakhoda tertinggi adalah unit melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan rawai tuna. Kompetensi tertinggi yang dimiliki oleh ABK adalah unit melakukan perawatan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di laut. Walaupun rendahnya pendidikan formal dan kurangnya pelatihan yang pernah diikuti oleh nelayan, kompetensi nelayan dapat digambarkan dengan pengalaman nelayan di laut. Nelayan dengan kompetensi yang baik akan mendapatkan pendapatan yang lebih. Namun kompetensi yang dimiliki oleh nelayan saat ini belum bersertifikat, sehingga cukup sulit untuk menjadikan kompetensi sebagai dasar untuk pendapatan nelayan.

Implikasi Kebijakan

Penelitian ini adalah agar pemerintah mendorong upaya peningkatan kompetensi nakhoda dan ABK pada semua unit kompetensi. Peningkatan kompetensi nakhoda lebih diprioritaskan, terkait dengan kompetensi menentukan haluan dan posisi seting serta menentukan kedalaman pancing. Peningkatan kompetensi ABK lebih diprioritaskan terkait: (1) Menyiapkan peralatan dan tempat penanganan ikan tuna hasil tangkapan di kapal; (2) Menyiapkan sistem penyimpanan; (3) Menangani ikan tuna. Peningkatan kompetensi tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan yang sesuai dengan materi kompetensi tersebut. Selain itu nelayan yang kompetensinya telah terpenuhi perlu diberikan sertifikat yang diakui.

UCAPAN TERIMA KASIH

Redaksi Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Saya ucapkan terima kasih kepada dewan redaksi atas koreksian pada draft jurnal yang saya buat. Berikut ini saya lampirkan draft jurnal saya dan tambahan ucapan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaali, P. Mulyono dan Ramly. 2000. Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan. Jakarta: PT. Grasindo. Hal 58.
- Effendi, S. dan T. Ukiran. 2012. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES. Hal 118- 121.
- Guilford, J. P. 1956. Fundamental Statistics in Psychology and Education. New York: Mc Graw-Hill Book Co. Inc. Page 145
- Hamzens, W. P. S. 2007. Pengembangan Mutu Sumber Daya Manusia Nelayan: Kasus Nelayan Kecil Di Pangkalan Pendaratan Muara Angke Provinsi DKI Jakarta. Tesis. Bogor (ID) : Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Iskandar, B. H., G. A. Wahyudi dan Nurani, T. W. 2011. Pre Requisite Study On Application Of Hazard Analysis Critical Control Point Management System For On Board Tuna Longliner. Indonesian Fisheries Research Journal. 17(2):111-117.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan [KKP]. 2014. Siaran Pers: Potensi Tuna Indonesia Tertinggi di Dunia. (http://kkp.go.id/index.php/arsip/c/10421/Potensi-Tuna-Indonesia-Tertinggi-Di-Dunia/?-category_id), diakses 26 Maret 2014.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia [Kemnakertrans]. 2013. Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2013 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Golongan Penangkapan Ikan Sub Golongan Penangkapan Ikan di Laut. Jakarta: (ID) Kemnakertrans.
- Palan, R. 2007. Competency Management. Octa MJ, penerjemah; Ramelan, editor. Jakarta (ID): Penerbit PPM. Terjemahan dari: Competency Management-a Practicine's Guide.
- Peraturan Pemerintah [PP]. 2000. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan. Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia [Perpres]. 2012. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jakarta.

- Priatna, B. A. 2008. Uji Coba Instrumen Penelitian dengan Menggunakan MS Excel dan SPSS BAPM Makalah November. Tersedia. pada: [http://file.upi.edu/ Direktori/ FPMIPA/JUR._PEND. MATEMATIKA/196412051990031BAMBANG_AVIP_PRIATNA_M/Makalah_November_2008.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR._PEND._MATEMATIKA/196412051990031BAMBANG_AVIP_PRIATNA_M/Makalah_November_2008.pdf). diakses 15 April 2015.
- Ramadhan, M. R., Y. Yoanita dan A. Sugih. 2014. Analisis Beban Kerja Dan Pengukuran Gap Kompetensi Teknisi Laboratorium Umum dan Fakultas Z Pts Xy : Reka Integra Jurnal Online Institut Teknologi Nasional. 2 (3):384-395.
- Saaty, T. L. 1987. The Analytical Hierarchy Process: What It is and How It is used . Pergamon Journal Ltd., Math. Modelling. 9(3-5):161-176.
- Swardjo, D., J. Haluan, I. Jaya dan S. H. Poernomo. 2010. Keselamatan Kapal Penangkap Ikan, Tinjauan dari Aspek Regulasi Nasional dan Internasional. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan. 1 (1): 1-13.